

Bulan :

1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	-----	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	(8)	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media :

Halaman :

01

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post ✓	Tabangan	

# Mantap, Kalteng Urutan ke-8

## Pencegahan Korupsi

### Nasional

#### PALANGKA RAYA, PPOST

Dua jempol patut diacungkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. Pasalnya, di bawah kepemimpinannya, provinsi yang berjuluk Bumi Tambun Bungai itu menduduki urutan ke-8 nasional dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi.

Rencana aksi koordinasi dan supervisi bidang pencegahan (korsupgah) Pemerintah Provinsi Kalteng mencapai 91

persen.

Prestasi Kalimantan Tengah dalam mencegah tipikor di daerah setempat terungkap dalam

rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Kalteng melalui konferensi video.

**Bersambung Ke Halaman 3**

CAPAIAN RENCANA AKSI KORSUPGAH		KEPATUHAN LHKPN EKSEKUTIF	
● Pemprov Kalteng	: 91%	● Pemprov Kalteng	: 100%
● Pemkab Katingan	: 87%	● Pemkab Kobar	: 100%
● Pemko Palangka Raya	: 83%	● Pemkab Gumas	: 100%
● Pemkab Kotim	: 79%	● Pemkab Barut	: 100%
● Pemkab Lamandau	: 77%	● Pemkab Seruyan	: 100%
● Pemkab Pulpis	: 76%	● Pemkab Kotim	: 97,01%
● Pemkab Kobar	: 74%	● Pemkab Sukamara	: 91,67%
● Pemkab Bartim	: 72%	● Pemkab Lamandau	: 90,91%
● Pemkab Seruyan	: 62%	● Pemkab Pulpis	: 75,51%
● Pemkab Gumas	: 62%	● Pemko Palangka Raya	: 72,78%
● Pemkab Barsel	: 62%	● Pemkab Kapuas	: 70,92%
● Pemkab Barut	: 60%	● Pemkab Katingan	: 69,17%
● Pemkab Kapuas	: 53%	● Pemkab Mura	: 58,15%
● Pemkab Mura	: 51%	● Pemkab Barsel	: 58,00%
● Pemkab Sukamara	: 51%	● Pemkab Bartim	: 46,88%

Famby

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media :

Halaman :

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabangan	

## Mantap.....Sambungan Halaman 1

Rakor yang juga diikuti oleh Pimpinan KPK Alexander Marwata, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Koordinator Wilayah II Korsupgah KPK beserta tim, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, serta para bupati/wali kota, dan sekda kabupaten/kota tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor Und/138/KSP.00/10-16/04/2020 tanggal 27 April 2020.

Gubernur Sugianto menyampaikan komitmen pemerintah daerah setempat mengenai implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah pada *monitoring centre for prevention* (MCP). Pemerintah Provinsi Kalteng siap untuk meningkatkan capaian dan kinerja dalam delapan area intervensi yang telah ditetapkan.

"Kami akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi pada monitoring MCP," tegasnya, kemarin, di Palangka Raya.

Tak hanya itu, Sugianto juga berkomitmen menyediakan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan survei penilaian integritas (SPI) tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPK sebesar Rp220 juta. Pihaknya akan berperan aktif dalam bentuk ketersediaan data pegawai, pengguna layanan,

dan narasumber pakar yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan SPI tahun 2020.

Pada kesempatan tersebut, Sugianto mengharapkan peningkatan kerja sama dengan Koordinator Wilayah II dan Satgas Korsupgah KPK, khususnya bersinergi untuk mengoptimalkan pencapaian depan area intervensi, yang mencakup perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang

dan jasa; pelayanan terpadu satu pintu; kapabilitas APIP; manajemen ASN; dana desa; optimisasi pendapatan daerah; dan manajemen aset daerah.

Bicara mengenai penanganan dampak covid-19, khususnya terkait ketentuan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, Sugianto mengimbau agar para bupati/wali kota tidak ragu menyalurkan bantuan sosial.

Melalui konferensi video itu, Pimpinan KPK Alexander Marwata, mengapresiasi pencapaian Kalteng dalam pelaksanaan rencana aksi korsupgah. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas pemerintah daerah, meski kini sedang sibuk menghadapi pandemi covid-19. Terkait strategi nasional pencegahan korupsi, Alexander mengingatkan tiga fokus utama, yang mencakup perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum.(why/P2)